



FORUM KERJA SAMA TIONGKOK-ASIA TENGAH DIADAKAN DI XIAMEN

Shen Yueyue, Wakil ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, juga Ketua Komisi Tetangga Baik, Persahabatan dan Kerja Sama Organisasi Kerjasama Shanghai, menghadiri upacara pembukaan Forum Kerja Sama Tiongkok-Asia Tengah ke-10 di Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok tenggara, Sabtu (9/9). Shen membacakan pesan ucapan selamat dari Presiden Xi Jinping kepada forum tersebut sebelum menyampaikan pidato utama.

Deklarasi KTT G20 Serukan Perdamaian

G20 setuju untuk mengatasi kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah.

NEW DELHI (IM)

Negara-negara anggota G20 mengadopsi deklarasi konsensus pada hari pembukaan KTT pada Sabtu (9/9). Kelompok ini menghindari kecaman terhadap Rusia atas perang di Ukraina tetapi meminta semua negara untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan untuk merebut wilayah lain. "Kami menyerukan kepada semua negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional termasuk integritas dan kedaulatan wilayah, hukum kemanusiaan internasional, dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas," kata deklarasi tersebut.

Perdana Menteri India Narendra Modi yang menjadi tuan rumah mengumumkan, deklarasi tersebut telah diadopsi pada hari pertama KTT. Konsensus ini mengejutkan karena kelompok ini terpecah belah terkait perang di Ukraina.

Negara-negara Barat sebelumnya mendorong keca-

man keras terhadap Rusia dalam Deklarasi Pemimpin. Sementara negara-negara lain menuntut fokus pada isu-isu ekonomi yang lebih luas.

"Kami menyambut baik semua inisiatif relevan dan konstruktif yang mendukung perdamaian komprehensif, adil, dan tahan lama di Ukraina. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima," ujar pernyataan bersama itu.

Deklarasi tersebut juga menyerukan penerapan inisiatif Laut Hitam untuk mengamankan aliran biji-bijian, makanan, dan pupuk dari Ukraina dan Rusia. Moscow menarik diri dari Black Sea Grain Initiative pada Juli 2023 karena kegagalan memenuhi tuntutan untuk menerapkan perjanjian paralel yang meringankan aturan ekspor pangan dan pupuknya.

"Di balik kerja keras semua tim, kami telah menerima konsensus mengenai Deklarasi KTT Pemimpin G20. Saya mengumumkan

penerapan deklarasi ini," kata Modi kepada para pemimpin yang hadir di New Delhi.

Isu lain yang tercantum dalam deklarasi tersebut adalah kelompok tersebut setuju untuk mengatasi kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Upaya ini akan dilakukan dengan cara yang efektif, komprehensif dan sistematis, meski tidak mencantumkan rencana tindakan baru.

Negara-negara G20 berjanji untuk memperkuat dan mereformasi bank pembangunan multilateral. Sementara mereka menerima proposal untuk peraturan mata uang kripto yang lebih ketat.

Pertemuan ini juga menyepakati bahwa dunia memerlukan pendanaan berbiaya rendah senilai total 4 triliun dolar AS setiap tahunnya untuk transisi energi. Porsi energi terbarukan berada dalam porsi yang besar dalam bauran energi primer.

Pernyataan tersebut juga menyerukan percepatan upaya menuju penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap. Namun tindakan ini harus dilakukan sejalan dengan kondisi nasional dan mengakui perlunya

dukungan menuju transisi yang adil.

Meskipun ada kompromi mengenai Deklarasi Pemimpin, KTT tersebut diperkirakan akan didominasi oleh negara-negara Barat dan sekutunya.

Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menghadiri pertemuan tersebut dan malah mengirim Perdana Menteri Li Qiang, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak akan hadir dan diwakili Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

"Adalah kewajiban pemerintah Tiongkok untuk menjelaskan mengapa pemimpinnya mau atau tidak ikut serta," ujar wakil penasihat keamanan nasional AS Jon Finer mengatakan kepada wartawan di Delhi.

Finer mengatakan, ada spekulasi bahwa Tiongkok menyerah pada G20 dan memilih kelompok seperti BRICS, yang merupakan negara dominan. BRICS beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, ditambah enam anggota baru lainnya, Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab.

Lavrov yang mewakili Putin mengatakan, akan memblokir deklarasi akhir

tersebut kecuali deklarasi tersebut mencerminkan posisi negaranya terhadap Ukraina dan krisis lainnya. Jika tidak ada kesepakatan mengenai deklarasi tersebut, India harus mengeluarkan pernyataan ketua, yang berarti bahwa G20 untuk pertama kalinya dalam 20 tahun pertemuan puncaknya tidak akan memiliki komunikasi.

Sementara itu, Merespons isi deklarasi, Kementerian Luar Negeri Ukraina melayangkan kritiknya karena teks deklarasi tak menyebut Rusia. Menurutnya deklarasi bersama oleh negara G20 terkait invasi Rusia atas Ukraina, tak ada yang bisa dibanggakan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko menulis di akun Facebook-nya, "Jelas partisipasi Ukraina dalam pertemuan G20 semestinya membuat peserta mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai situasi perang di Ukraina."

Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz berpandangan lain. Ia menyatakan deklarasi ini menunjukkan posisi jelas mengenai invasi Rusia ke Ukraina, yaitu menyinggung soal integritas wilayah negara yang tak dapat diganggu melalui jalan kekerasan. ● tom

Para Pemimpin Negara Kunjungi Monumen Mahatma Gandhi Usai KTT G20

NEW DELHI (IM)

Para pemimpin G20 memberikan penghormatan di monumen yang didedikasikan untuk pemimpin kemerdekaan India, Mahatma Gandhi pada Minggu (10/9). Kunjungan ke monumen itu berlangsung sehari setelah para pemimpin mencapai kesepakatan mengenai berbagai masalah dalam KTT G20.

Setelah agenda utama tersebut diselesaikan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida saling berjabat tangan dan berfoto bersama Perdana Menteri India, Narendra Modi ketika mereka tiba di situs peringatan Rajghat di New Delhi.

Modi menghendahkan seldang yang terbuat dari khadi kepada para pemimpin negara. Khadi adalah kain tenunan tan-

gan yang dipromosikan oleh Gandhi selama gerakan kemerdekaan India melawan Inggris.

Beberapa pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan tuan rumah G20 tahun lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berjalan ke tugu peringatan tersebut tanpa alas kaki sebagai bentuk penghormatan.

Banyak warga lainnya, termasuk Presiden AS Joe Biden, mengenakan sandal yang rutin ditawarkan kepada pengunjung saat mereka berjalan di tanah basah yang dipenuhi genangan air akibat hujan lebat.

Para pemimpin berdiri di depan karangan bunga yang ditempatkan di sekitar tugu peringatan. Monumen itu menampilkan api abadi dan dihiasi dengan karangan bunga marigold berwarna oranye dan kuning. India, yang menjadi

tuan rumah KTT Kelompok 20 (G20) tahun ini, mengakhiri hari pertama pertemuan puncak dengan kemenangan diplomatik, kendati ada perbedaan pendapat di antara anggota-anggota yang berkuasa, khususnya mengenai perang di Ukraina. Saat sesi pertama dimulai, Modi mengumumkan bahwa kelompok tersebut menambahkan Uni Afrika sebagai anggota G20. Langkah ini adalah bagian dari upaya pemimpin India tersebut untuk mengangkat Global South.

KTT G20 juga mengungkap rencana ambisius bersama Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain untuk membangun koridor kereta api dan pelayaran yang menghubungkan India dengan Timur Tengah dan Eropa. Langkah ini bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kerja sama politik. ● ans



KOTA KUNO SUOYANG, GUAZHOU, CHINA

Sisa-sisa tembok kota kuno Suoyang di Gurun Gobi, kabupaten Guazhou, provinsi Gansu, China. Sabtu (9/9). Kota tersebut pernah menjadi pusat administrasi, ekonomi dan budaya yang makmur pada masa dinasti Tang dan Xia dengan populasi sekitar 50.000 orang, namun kemudian hancur pada sekitar abad ke-16.

Rusia Tolak Usulan PBB Kembali Hidupkan Kesepakatan Biji-bijian

MOSKOW (IM)

Rusia tetap berpegang pada persyaratannya untuk kembali ke kesepakatan gandum Laut Hitam yang dihentikan pada Juli. Moscow menolak tawaran yang sebelumnya telah diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Perjanjian tersebut mengatakan bahwa SWIFT harus terbuka untuk Roselkhozbank, dan bukan untuk anak perusahaannya. Artinya, kita berbicara tentang perlunya kembali ke dasar, ke perjanjian yang ada pada awalnya dan yang dijanjikan kepada kami akan dipenuhi," kata juru bicara Istana Kremlin Dmitry Peskov.

Secara khusus, Peskov mengatakan, Rusia memerlukan bank pertanian negaranya untuk dihubungkan kembali ke sistem pembayaran bank SWIFT. Pernyataan ini secara tidak langsung merujuk pada penolakan usulan PBB untuk memasukan anak perusahaan bank tersebut.

Rusia mengatakan ekspor biji-bijian dan pupuknya, meskipun tidak secara khusus dilarang oleh negara-negara Barat, menghadapi hambatan dalam praktiknya. Sanksi yang ditetapkan mempengaruhi akses pelabuhan, asuransi, logistik dan pembayaran, termasuk penghapusan bank pertanian Roselkhozbank dari SWIFT.

PBB telah mengusulkan agar anak perusahaan Roselkhozbank yang berbasis di Luksemburg dapat segera mengajukan permohonan ke SWIFT. Langkah ini untuk secara efektif memungkinkannya akses bagi bank tersebut dalam waktu 30 hari. "Semua kondisi kami sudah diketahui dengan baik. Kondisi tersebut tidak memerlukan interpretasi, kondisi tersebut benar-benar konkrit dan semua ini dapat dicapai," kata Peskov.

Menurut Peskov, Moscow mempertahankan posisinya yang bertanggung jawab, jelas dan konsisten, yang telah berulang kali disuarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Presiden dengan jelas mengatakan bahwa jika sudah terpenuhi, maka kesepakatan akan segera dilanjutkan. Tapi tidak sebaliknya," ujarnya.

Pernyataan kembali sikap Moscow yang tanpa kompromi terjadi lima hari setelah Putin bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan membahas masalah gandum. Rusia tampaknya mendapat

dorongan dari pernyataan Erdogan pada pertemuan itu, bahwa Ukraina harus melunakkan pendekatannya dalam pembicaraan mengenai menghidupkan kembali Black Sea Grain Initiative.

Kiev juga perlu mengeksplor lebih banyak biji-bijian ke Afrika daripada ke Eropa. Erdogan juga mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di KTT G20 di India mengenai upaya untuk menghidupkan kembali perjanjian tersebut.

Sedangkan Ukraina mengatakan, pihaknya tidak akan mengubah pendiriannya dan tidak akan menjadi sandera pemerasan Rusia. Sedangkan Presiden Dewan Eropa Charles Michel dalam pidato KTT G20 di New Delhi pada Sabtu (9/9) menyatakan, kesepakatan gandum telah memberikan kepada negara-negara rentan lebih dari 30 kali lipat volume yang ditawarkan Rusia ke Afrika. "Dan betapa sinisnya... Anda tidak menerima ini," katanya dalam komentarnya mengenai kesepakatan gandum yang ditujukannya kepada perwakilan Rusia dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Michel menyatakan, tawaran satu juta ton gandum ke negara-negara Afrika adalah parodi kemurahan hati. "Sungguh sinisme dan penghinaan terhadap negara-negara Afrika," ujarnya.

Kesepakatan Laut Hitam ditengah oleh Turki dan PBB pada Juli 2022 untuk memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian melalui laut meskipun terjadi perang dan membantu meringankan krisis pangan global. Hal ini disertai dengan perjanjian untuk memfasilitasi ekspor makanan dan pupuk Rusia, yang menurut Moscow belum dipenuhi.

Sejak keluar dari kesepakatan gandum, Rusia telah berulang kali mengomb pelabuhan dan gudang gandum Ukraina. Serangan ini mendorong Kiev dan negara-negara Barat menuduh Moscow menggunakan makanan sebagai senjata.

"Anda tidak hanya memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian di Laut Hitam ini, namun pada saat yang sama Anda menyerang infrastruktur pelabuhan. Anda memblokir pelabuhan yang memberikan akses ke Laut Hitam, dan bahkan ke Danube," ujar Michel. ● gul

Presiden Kolombia Usulkan Aliansi Amerika Latin Lawan Kartel Narkoba

BOGOTA (IM)

Presiden Kolombia Gustavo Petro mengajak aliansi negara-negara Amerika Latin untuk bersatu dalam memerangi perdagangan narkoba. Dengan mengakui penggunaan narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat alih-alih menghidupkannya dengan apa yang ia sebut pendekatan militer yang "gagal".

Petro, presiden sayap kiri pertama dalam sejarah Kolombia, menutup Konferensi Narkoba Amerika Latin dan Karibia, di Kota Cali, dengan mengatakan 50 tahun perang narkoba telah gagal. Ia menambahkan kegagalan ini mengakibatkan pertumpahan darah dan penderitaan yang sangat besar di Amerika Latin.

"Apa yang saya usulkan memiliki suara yang berbeda dan menyatukan yang mempertahankan masyarakat, masa depan, sejarah dan berhenti mengulangi wacana yang gagal," kata presiden Kolombia Gustavo Petro pada Sabtu (9/9).

"Sudah waktunya membangun kembali harapan dan tidak mengulangi perang berdarah dan ganas, 'perang melawan narkoba', memandang narkoba sebagai masalah militer dan bukan sebagai masalah kesehatan bagi masyarakat," kata Petro.

Seperti negara-negara Amerika Latin lainnya Kolombia dilanda kekerasan tanpa henti akibat perdagangan narkoba. Sementara menurut para pakar kartel narkoba di negara itu semakin kuat dan besar.

Dalam pernyataan bersama negara-negara yang

berpartisipasi dalam konferensi tersebut mengatakan permintaan terhadap obat-obatan terlarang harus dikurangi. Caranya dengan mendidik masyarakat dan memerangi kesenjangan, kemiskinan, kurangnya kesempatan dan kekerasan.

Mereka juga sepakat mengenai perlunya memutus hubungan berbahaya antara perdagangan narkoba dan senjata api, kejahatan terorganisir transnasional, pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan migran, pencucian uang dan korupsi.

Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, yang menghadiri acara tersebut mengatakan negara-negara Amerika Latin harus memperkuat keluarga, memerangi kemiskinan, dan mendorong penanaman jagung, kacang-kacangan, kakao, kopi, buah-buahan dan kayu.

Sebagai cara untuk mengurangi luas lahan yang digunakan untuk tanaman terlarang seperti ganja, poppy yang digunakan untuk membuat opium dan daun koka bahan baku obat-obatan seperti heroin dan kokain.

Presiden Meksiko mengatakan negara-negara Amerika Latin perlu mendukung Amerika Serikat dalam upaya melawan fentanil karena "kewajiban moral" dan "humanisme".

"Mereka menghadapi pandemi, terlepas dari perbedaan kita, ide-ide partisan dan posisi ideologis adalah hak asasi manusia dan hak asasi manusia yang utama adalah hak untuk hidup," kata Lopez Obrador. ● ans

Sekjen PBB Dukung Reformasi Dewan Keamanan

NEW DELHI (IM)

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, lembaga tersebut perlu menyesuaikan perubahan dan kebutuhan zaman.

"Dunia kita berada dalam momen transisi yang sulit. Masa depan kita bersifat multipolar, namun lembaga-lembaga multilateral kita mencerminkan masa lalu," kata Guterres kepada awak media di New Delhi, India, sehari sebelum KTT G20 dimulai, Jumat (8/9).

"Arsitektur keuangan global sudah ketinggalan zaman, tidak berfungsi, dan tidak adil. Hal ini membutuhkan reformasi struktural yang mendalam, dan hal yang sama juga berlaku pada Dewan Keamanan PBB," ujar Guterres menambahkan.

Seruan reformasi Dewan Keamanan PBB telah diumumkan oleh sejumlah negara. Peran badan tersebut dinilai tak lagi mencerminkan kebutuhan perkembangan dinamika geopolitik global beserta tantangannya. Sebab struktur Dewan Keamanan PBB saat ini masih sama ketika dibentuk pada 1946, yaitu terdiri dari lima anggota tetap mencakup negara pemenang Perang Dunia II yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Kelima negara tersebut memiliki hak veto.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap. Kursi ke-10 anggota tersebut diisi bergilir oleh negara anggota PBB. Masa keanggotaan mereka hanya dua tahun. Pada Juni lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan negaranya mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB. Terkait hal itu, Rusia bakal mengupayakan perluasan anggota di dewan tersebut dengan merangkul negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Lavrov mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus direformasi sesuai dengan realitas yang ada. Menurutnya, dominasi negara-negara Barat pada badan tersebut harus disimbangkan.

"Dari 15 anggota (tetap dan tidak tetap), yang disebut 'golden billion' menempati enam kursi, ini tidak adil, tidak adil. Oleh karena itu, kami akan berupaya memperluas keanggotaan Dewan Keamanan sesegera mungkin dengan memasukkan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin," ujar Lavrov dalam sebuah konferensi pers di Moscow, 30 Juni 2023 lalu, dikutip Anadolu Agency.

Lavrov mengungkapkan, waktunya telah tiba untuk beralih ke kesetaraan. "Jika setiap orang mendukung demokrasi, jangan lupa bahwa demokrasi juga diperlukan dalam hubungan internasional," kata diplomat berusia 73 tahun tersebut. ● gul